

## **JAWABAN TUGAS 2**

Rhiza S. Sadjad  
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kode>Nama MK : **ISIP4213.38/Sistem Politik Indonesia 38**  
Tugas : 2

### TUGAS:

*Buatlah makalah atau paper yang membahas mengenai kinerja **salah satu** lembaga negara (lembaga eksekutif, lembaga legislatif, atau lembaga yudikatif) di era reformasi saat ini! Pembahasan disertai dengan analisis kekuatan dan kelemahan atas produktivitas kinerja lembaga tersebut!*

### Jawaban:

## **MENGUKUR KINERJA DPR RI**

Istilah “kinerja” (terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “*performance*”) sebenarnya berasal dari dunia industri. Tingkat produktivitas suatu unit di dunia industri dinilai secara kuantitatif (diukur dengan angka-angka, metrik) menggunakan ukuran yang disebut “*key performance indicators*” disingkat KPI. Timbul pertanyaan, dapatkah produktivitas atau kinerja lembaga non-industrial seperti instansi pemerintah atau lembaga negara seperti lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diukur secara metrik menggunakan KPI? Tidakkah nanti merendahkan martabat DPR RI menjadi seperti “industri legislasi”? Referensi [3] menunjukkan contoh bagaimana DPR RI memang secara berkala membuat laporan publik tentang kinerjanya selama setahun. Jadi mengukur kinerja DPR RI memang suatu hal yang “rutin”, dan biasa saja. Tidak perlu dipermasalahkan.

Referensi [2] meng-konfirmasi bahwa kinerja DPR RI memang bisa diukur secara metrik menggunakan beberapa KPI, misalnya: (1) banyaknya undang-undang yang dihasilkan sebagai KPI untuk fungsi legislasi, (2) seringnya menyelenggarakan dengar pendapat dengan pemerintah sebagai KPI untuk fungsi pengawasan, (3) survey kepuasan konstituen, (4) kehadiran anggota DPR RI dalam sidang-sidang, dan (5) kelancaran proses pengesahan APBN dari RAPBN yang diajukan pemerintah sebagai KPI fungsi penganggaran. Semua KPI ini dilaporkan secara terinci dalam referensi [3], menunjukkan bahwa DPR RI memang telah melaksanakan pengukuran dan pelaporan secara kuantitatif dari kinerja-nya selama periode setahun. Apakah dengan mempelajari laporan kinerja tersebut kita bisa menilai bahwa DPR RI selama periode setahun itu sudah cukup produktif, atau sudah baik kinerja-nya? Dari bagian PENUTUP referensi [3], hal. 214, tidak ada kesimpulan yang menyatakan apakah kinerja DPR RI sudah cukup baik, atau masih kurang. Hanya dikatakan bahwa DPR RI telah “*bersama pemerintah mengupayakan pemulihan di berbagai bidang*”,

maksudnya setelah berlalu masa pandemi COVID-19, dan bahwa kinerja yang dilaporkan merupakan “*hasil kerja keras untuk memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat*”. Jadi dari KPI yang dilaporkan tidak dapat ditarik kesimpulan tentang baik atau tidaknya kinerja DPR RI, dan jika seandainya kinerjanya baik, tidak dapat disimpulkan sudah seberapa baik. Hal ini karena dalam laporan tersebut tidak mencantumkan KPI acuan sebagai pembanding. Seharusnya, laporan kinerja DPR RI, selain melaporkan KPI, juga mencantumkan KPI acuan, sehingga KPI yang dilaporkan dapat di-analisis dengan membandingkannya pada KPI acuan, sampai dihasilkan kesimpulan tentang baik-buruknya kinerja, atau seberapa tingkat produktivitas, efektivitas dan efisiensi dari DPR RI tersebut.

KPI yang dilaporkan oleh DPR RI dapat dibandingkan dengan beberapa acuan, menurut referensi [2], misalnya:

- (1) KPI dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan membandingkan KPI dari tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui apakah kinerja DPR RI semakin membaik dari tahun ke tahun, atau semakin memburuk.
- (2) KPI dari parlemen negara-negara lain. KPI dari parlemen negara-negara lain dapat dijadikan acuan untuk melihat apakah DPR RI lebih baik atau lebih buruk kinerjanya dibandingkan parlemen-parlemen sejenis di negara-negara lain.
- (3) Target sasaran. Biasanya, setelah mengukur kinerja dari tahun sebelumnya, dapat ditetapkan target untuk tahun berikutnya, yang dapat dijadikan acuan untuk melihat apakah kinerja DPR RI sudah baik, dalam arti mencapai target atau tidak. Misalnya ditargetkan tahun berikut DPR RI akan menghasilkan 10 Undang-Undang baru. Jika kemudian hanya jadi 5 Undang-Undang, maka dikatakan pencapaian DPR RI tahun ini hanya 50% dari target legislasi.
- (4) Opini Publik. Dengan membuat survey kepuasan konstituen (*Constituent Satisfaction Polling*) secara berkala, dapat diketahui apakah kinerja DPR RI sudah memenuhi keinginan dari warga masyarakat, khususnya konstituen yang memilih para anggota legislatif dalam PILLEG.
- (5) Standar Internasional. KPI dari DPR RI juga dapat dibandingkan dengan acuan baku internasional yang dapat diperoleh dari lembaga-lembaga internasional seperti IPU (*Inter-Parliamentary Union*) dan TI (*Transparency International*).

Pembahasan terkait kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) kinerja produktivitas DPR RI, dapat dikaji lebih mendalam dari referensi [4]. Sebagaimana diketahui, ada 3 (tiga) fungsi utama DPR RI sebagai lembaga legislatif, yaitu fungsi-fungsi (1) **Legislasi**, (2) **Anggaran**, dan (3)

**Pengawasan**, yang dalam referensi [4] ditambahkan satu fungsi lagi, yaitu (4) **Diplomasi Parlemen**.

- (1) **Fungsi Legislasi**. Dari referensi [4], [hal. 2 – 11] dapat diketahui bahwa dari keempat fungsi DPR RI, hanya fungsi legislasi ini yang dalam evaluasi kinerjanya mendapatkan “Catatan”, sedangkan ketiga fungsi yang lain tidak mendapatkan catatan, hanya rekomendasi dan penutup. Memang dari segi **produktivitas**, kinerja DPR RI yang paling **lemah** adalah dalam fungsi legislasinya. Dari 42 RUU yang diprioritaskan dalam Prolegnas (kemudian dikurangi menjadi tinggal 37 RUU), hanya 18 (43 % dari 42, atau 49 % dari 37) yang berhasil disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah, itu pun 4 di antaranya masih punya beberapa catatan yang belum diselesaikan.
- (2) **Fungsi Anggaran**. Dari referensi [5 (e)] diketahui bahwa di Amerika Serikat pun, pelaksanaan fungsi anggaran dari parlemen bisa mengakibatkan “*government shut down*” (tutupnya pemerintah), karena anggaran yang diajukan oleh pemerintah tidak atau belum disetujui parlemen pada waktu yang sudah dijadwalkan. Dengan mengacu pada apa yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu sering terjadinya “*government shut down*” akibat keterlambatan kerja parlemen, maka salah satu **kekuatan** DPR RI adalah selalu **tepat waktu** dalam menyelesaikan pembahasan terkait **RAPBN** (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan Pemerintah. Tetapi dari referensi [4], [hal. 12 - 20] diketahui bahwa masih ada **persoalan** DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran, yaitu antara lain: (a) peran *check and balance* dalam pembahasan RAPBN belum maksimal, (b) pengelolaan aspirasi konstituen terkait anggaran pembangunan tidak transparan, kurang partisipatif (Musrembang yang tidak efektif) dan belum akuntabel, serta (c) pengelolaan anggaran DPR sendiri yang tidak transparan. **Persoalan-persoalan** ini merupakan **kelemahan** dari kinerja produktivitas DPR RI dalam fungsi **budgeting**-(penganggaran)-nya
- (3) **Fungsi Pengawasan**. Menurut referensi [4], [hal. 21 – 30], fungsi pengawasan DPR RI ada 2 (dua) macam, yaitu (1) fungsi *oversight*: interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, dan (2) fungsi *overview*: rapat kerja dengan mitra pemerintah dan rekomendasi. Dari referensi [4] dicatat ada **607** kali **rapat kerja** di DPR RI, tapi tidak sekali pun dilakukan interpelasi, angket mau pun menyatakan pendapat. Jadi bisa dikatakan dalam fungsi pengawasan, **kekuatan** DPR RI adalah dalam fungsi *overview*, dan **kelemahan**-nya adalah dalam fungsi *oversight*.
- (4) **Fungsi Diplomasi Parlemen**. Diplomasi luar-negeri Indonesia dilaksanakan dengan *multi-track diplomacy*, artinya untuk hubungan internasional, Indonesia tidak hanya mengandalkan pemerintah c.q. Kemenlu, tapi juga dilaksanakan oleh parlemen, dalam hal ini DPR RI. Menurut referensi [4], hal. 31 – 38], diplomasi parlemen dilaksanakan dengan

berbagai kegiatan, yaitu (1) Kunjungan Antar-Parlemen, yang terbanyak, (2) Partisipasi dalam keanggotaan Organisasi Internasional, (3) Mengirim Delegasi dalam Konferensi Internasional, dan (4) Edukasi Diplomasi. Dalam setahun bisa lebih dari **50 kali** diadakan kegiatan terkait diplomasi parlemen, berarti hampir sepekan sekali, dan ini menjadi **kekuatan** dari fungsi diplomasi parlemen. Sedangkan **kelemahan**-nya adalah **minim internalisasi** legislasi, menurut referensi [4], hal. 36.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan metrik berupa KPI, kinerja produktivitas dari DPR RI dapat diukur secara kuantitatif-numerikal, sebagaimana dilakukan selama ini dengan menerbitkan laporan kinerja.
2. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang baik atau tidaknya kinerja DPR RI, diperlukan acuan KPI sebagai bahan perbandingan.
3. Kinerja produktivitas DPR RI untuk periode tahun 2022-2023 secara umum memiliki kelemahan dan kekuatan, tergantung fungsinya. Kelemahan kinerja DPR RI justru terletak pada fungsi legislasi-nya, sedangkan untuk ketiga fungsi yang lain, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi diplomasi parlemen, masing-masing ada kekuatan dan kelemahannya.

## REFERENSI

- [1] **Ikhsan Darmawan, et.al.**, “*Sistem Politik Indonesia*”, Modul 1 – 9, ISIP4213, Edisi 3 [Mei 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi *Chatting* berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.
- [3] **Anonymous**, “*DPR KUAT RAKYAT SEJAHTERA*”, **Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021-2022**, DPR RI, Jakarta, 2022.
- [4] **Anonymous**, “*Laporan Akhir Tahun 2023*”, **Catatan dan Evaluasi Kinerja DPR RI dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, dan Diplomasi Parlemen Tahun 2023**, *Indonesian Parliamentary Center*, Jakarta,
- [5] Sumber-sumber *On-line*:
  - (a) <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Kinerja-DPR-Pimpinan> diakses tgl. 12 Mei 2024
  - (b) <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46132/t/DPR%20Telah%20Susun%20Laporan%20Kinerja%202022-2023,%20Bentuk%20Pertanggungjawaban%20Terhadap%20Rakyat%20Indonesia> diakses tgl. 12 Mei 2024
  - (c) <https://ipc.or.id/laporan-akhir-tahun-catatan-dan-evaluasi-kinerja-dpr-ri-dalam-menjalankan-fungsi-legislasi-fungsi-anggaran-fungsi-pengawasan-dan-fungsi-diplomasi-tahun-2023/> diakses tgl. 12 Mei 2024
  - (d) <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47886> diakses tgl. 12 Mei 2024.
  - (e) <https://www.brookings.edu/articles/what-is-a-government-shutdown-and-why-are-we-likely-to-have-another-one/> diakses tgl. 12 Mei 2024.